

## BAB III

### FPI DALAM PROGRAM ACARA ILC TV ONE, EPISODE “FPI MENYERANG, AHOK MELAWAN”

#### A. Profil FPI

##### 1. Berdirinya FPI

###### a. Sejarah Berdirinya FPI

FPI didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-53. FPI dideklarasikan oleh pimpinannya, yaitu KH.Misbahul Anam, dan bertempat di Pondok Pesantren Al-Umm, Ciputat, Jakarta Selatan. Deklarasi FPI diramaikan dengan tabligh akbar dan disesuaikan dengan milad Pondok Pesantren Al-Umm. Gagasan berdirinya FPI berawal dari diskusi antara Habib Muhammad Riziq Shihab dengan KH. Misbahul Anam yang kemudian menjadi tokoh pendiri FPI. Mereka prihatin dengan melonjaknya grafik kemaksiatan dan kemungkaran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mereka mengajak ulama dan habib lainnya, seperti KH. Cecep Busthomi (meninggal ditembak), KH. Damanhuri, dan Habib Idrus Jamalulail untuk terlibat di dalamnya (Effendy, dkk, 2007: 11).

Ketika masa Orde Baru, umat Islam yang menjadi mayoritas warga Indonesia hanya menjadi penonton dalam proses politik dan bahkan menjadi korban pembangunan, seperti: tanahnya diambil secara paksa untuk pembangunan, hak-hak politiknya dibatasi karena dianggap mengganggu stabilitas, dan gerakannya selalu dicurigai. Selain itu, seluruh kekuatan politik strategis, seperti pemegang kebijakan (*policy*), sektor ekonomi dan bisnis, selalu dikuasai oleh etnis Cina atau orang-orang yang tidak memiliki perhatian terhadap umat Islam (Al-Zastrouw, 2006: 85). Oleh sebab itu, FPI memiliki *ghirah* untuk membangun dan memberdayakan umat Islam di Indonesia agar mendapatkan kesempatan untuk mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik (Jurdi, 2008: 434).

Sesungguhnya, FPI banyak dikenal oleh masyarakat sebagai ormas yang sangat keras dan tidak mentolerir praktek-praktek prostitusi dan perjudian, khususnya di Jakarta (Zada, 2002: 163). Bagi kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada dunia malam, (seperti hiburan malam, diskotik, atau tempat perjudian), eksistensi FPI dianggap sebagai ancaman yang sangat serius bagi mereka (Jurdi, 2008: 433). FPI tidak jarang melakukan penyerbuan di tempat- tempat maksiat tersebut (Riklefs, 2008: 727). Hal inilah yang membuat FPI menjadi perhatian publik karena ia tak segan-segan dalam aksi memberantas kemaksiatan, yaitu menggunakan jalan kekerasan (Effendy, dkk, 2007: 11). FPI menganggap hal tersebut merupakan bagian dari *nahi munkar* (mencegah kemungkaran) (Syafi'i, 2009: 189).

Menurut Habib, sebagaimana dikutip Bachtiar Effendy, maksud dan tujuan perjuangan FPI sebagai organisasi Islam yang berasaskan *aqidah ahlu sunnah wa al- jama'ah* (berorientasi *manhaj salafi*), yaitu untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Penyebutan kata “Pembela Islam” di sini maksudnya, bahwa yang dibela oleh FPI bukan umat Islamnya saja, tapi juga nilai-nilai ke-Islaman yang bisa jadi dilaksanakan juga oleh umat non muslim. Motto perjuangan FPI yang selalu diangkat adalah “Hidup Mulia atau Mati Syahid” (Effendy, dkk, 2007: 12).

FPI merumuskan latar belakang berdirinya yaitu sebagai berikut: *pertama*, adanya penderitaan panjang yang dialami umat Islam Indonesia sebagai akibat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. *Kedua*, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. *Ketiga*, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (Al-Zastrouw, 2006: 90).

#### **b. Tujuan Berdirinya FPI**

Tujuan berdirinya FPI adalah untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam mencapai tujuan *amar ma'ruf*, FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah: mengajak dengan *hikmah* (kebijaksanaan, lemah lembut), memberi *mau'idzah hasanah* (nasihat yang baik), dan *mujadalah*

dengan cara yang terbaik. Sedangkan dalam melakukan *nahi munkar*, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah, yaitu menggunakan kekuatan atau kekuasaan bila mampu dan menggunakan lisan dan tulisan. Jika kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan, maka *nahi munkar* dilakukan dengan menggunakan hati, yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran (Al-Zastrouw, 2006: 12).

Tujuan lain dibentuknya FPI adalah untuk membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan, seperti: prostitusi, perjudian, serta transaksi miras, dan narkoba (Al-Zastrouw, 2006: 92). Menurut aktivis FPI, sebagaimana dikutip Effendy, salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk menanggulangi krisis moral yang melanda bangsa ini adalah dengan melakukan kerja sama yang harmonis dari seluruh elemen masyarakat, yang meliputi kaum ulama, umaro, dan seluruh umat Islam (Effendy, dkk, 2007: 11).

### **c. Keanggotaan, Rekrutmen, dan Kaderisasi**

FPI tidak melakukan rekrutmen keanggotaan secara permanen dan sistematis, karena FPI sebagai organisasi gerakan dan tidak begitu mementingkan bentuk kelembagaan. Para anggota FPI tidak terikat pada aturan organisasi yang formal dan ketat. Sesungguhnya, pengikat utama yang menyatukan anggota FPI adalah komitmen moral dan loyalitas pada pemimpin. FPI tetap melaksanakan rekrutmen keanggotaan secara formal untuk memenuhi standar formalitas organisasi, meski hal ini tidak menjadi menjadi sesuatu yang utama (Al-Zastrouw, 2006: 102).

Pola rekrutmen FPI dan bentuk organisasi sangat cair, maka keanggotaan FPI juga bersifat demikian. Artinya, seseorang dapat dengan mudah masuk ataupun meninggalkan (keluar) organisasi tanpa harus melalui prosedur birokrasi atau proses yang sangat rumit. Oleh karena itu, pembinaan anggota dan kader dilakukan secara nonformal, misalnya melalui pengajian, ceramah, dan penugasan saat diselenggarakan suatu aktivitas tertentu. Selain itu, terdapat pola kaderisasi yang dinamakan pemagangan. Artinya, kader-kader tertentu yang telah memiliki

derajat loyalitas dan komitmen tertentu terhadap pimpinan, dia yang akan dijadikan ajudan oleh pemimpin tertentu (Al-Zastrouw, 2006: 104).

FPI menginginkan dakwah Islam harus menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada masyarakat yang berada pada stratifikasi bawah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Jurdi, 2008: 438). Secara sosiologis, anggota FPI dapat dipilih menjadi empat kategori: *pertama*, masyarakat awam, yaitu masyarakat biasa yang ikut aktif dalam pengajian yang diselenggarakan oleh FPI. *Kedua*, kelompok intelektual dan akademisi, yaitu para mahasiswa, dosen, dan peneliti. *Ketiga*, kelompok preman dan anak jalanan. Kelompok ini direkrut oleh FPI tidak melalui jalur formal pendaftaran, tetapi melalui pendekatan personal yang dilakukn oleh para pemimpin FPI. *Keempat*, golongan habib dan alim ulama. Kelompok inilah yang merupakan kelompok elit dalam FPI (Al-Zastrouw, 2006: 104-106).

#### **d. Visi dan Misi FPI**

FPI memiliki kerangka berfikir organisasi, yaitu sebagai visinya, bahwa menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan satu-satunya solusi untuk menjauhkan kedzaliman dan kemunkaran. Artinya, segala kedzaliman dan kemunkaran tidak akan sirna dari kehidupan umat manusia, tanpa adanya *amar ma'ruf nahi munkar* (Kusuma, 2010: 59).

FPI bermaksud menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* secara *kaffah* di segenap sektor kehidupan dengan menciptakan umat *shalihah* yang hidup dalam *baladun thoyyibatun* dengan kelimpahan dan keberkahan Allah SWT (Kusuma, 2010: 59). Sehingga, FPI merumuskan visi dan misi sebagai berikut: penerapan syariat Islam secara *kaffah* di bawah naungan *khilafah Islamiyah* menurut *manhaj nubuwwah* melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan jihad.

#### **e. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi FPI dibuat dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dan pembagian tugas dalam melakukan gerakan. Dewan Pengurus

Pusat, berkedudukan di Jakarta. Ditingkat Propinsi disebut dengan Pengurus Wilayah, dan di tingkat kabupaten disebut Dewan Pengurus Cabang (Al-Zastrouw, 2006: 94).

Di tingkat kelurahan disebut Posko (Pos Komando), dan di luar negeri disebut Dewan Perwakilan Front (DPF) (Kusuma, 2010: 60). Sedangkan struktur kepemimpinan FPI tersusun menjadi dua komponen, sebagai berikut:

1. Majelis Syura: Majelis Syura Dewan Tertinggi Front yang dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris. Dalam menjalankan tugasnya, majelis syura dibantu oleh lima wakil ketua yang masing-masing merupakan Ketua Dewan Tinggi Front.
2. Majelis Tahfidzi: Sedang majelis tahfidzi di tingkat daerah/ wilayah/ cabang dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh beberapa wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara (Kusuma, 2010: 60).

Adapun susunan Majelis Tahfidzi dan Majelis Syura, yaitu sebagai berikut:

a. Susunan Dewan Tahfidzi DPP- FPI Periode 2015- 2020

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ketua Umum                           | : KH. Ahmad Shabri Lubis, S.Pd.I       |
| Wakil Ketua Umum                     | : KH. Ja'far Shidiq, SEI               |
| Sekretaris Umum Umum                 | : H. Hasanuddin                        |
| Bendahara Umum                       | : HarisUbaidillah                      |
| 1. Ketua Bidang Dakwah               | : KH. Zainuddin Ali                    |
| 2. Ketua Bidang Hisbah               | : KH. Slamet Ma'arif, MPd              |
| 3. Ketua Bidang Jihad                | : Ustadz Abdul Qadir AKA               |
| 4. Ketua Bidang Penegakkan Khilafah  | : KH. Tb. Abdurrahman Anwar, SH,<br>MH |
| 5. Ketua Bidang Keorganisasian       | : H. Munarman, SH                      |
| 6. Wasekum Bidang Dakwah             | : Hb. Salim b. Umar Alattas            |
| 7. Wasekum Bidang Hisbah             | : Hb. Muhammad b Thoha Assegaf         |
| 8. Wasekum Bidang Jihad              | : KH. Abdul Majid                      |
| 9. Wasekum Bidang Pengakkan Khilafah | : Ustadz. Irbabul Lubab                |

10. Wasekum Bidang keorganisasian : Ustadz Azis Yanuar, SH, MH
11. Wabendum Bidang Dakwah : Ustadz H. Syahid Joban
12. Wabendum Bidang Hisbah : Ustadz Baharuddin  
: Hb. Abdurrahman bin Yahya
13. Wabendum Bidang Penegakkan Khilafah : Hb. Idrus b. Hasan Algadri
14. Wabendum Bidang Keorganisasian : Ustadz Edi Purwanto
- b. Pengurus Majelis Syura DPP- FPI Periode 2015- 2020
- Ketua : KH. Drs. Syeikh Misbahul Anam Attijani
- Sekretaris : Ustadz H. Abdul Fattah, SE, MBA.
1. Ketua Dewan Syariah : KH. Najih Maimoen Zuber, Lc, MA (Jateng)  
Sekretaris Dewan Syariah : Hb. Muhsin Ahmad Alattas, Lc (Depok)  
Anggota : KH. Ahmad Rijani (Kaltim)  
Hb. Ahmad B. Hasyim B. Qutban (Jogja)  
Ust. Badar Al- Amri (Sulteng)
2. Ketua Dewan Pembina : KH. Ma'sum Hasan (Ciamis)  
Sekretaris Dewan Pembina : KH. Awit Masyhuri (Tangsel)  
Anggota : Drs. Tgk. H. Adli Almadani (NAD)  
Hb. Azis Assegaf (Riau Daratan)  
Abdurrahman Ba'asyim (Kalsel)  
Ust. H. Nazaruddin (Sumut)
3. Ketua Dewan Penasehat : KH. Sa'dullah (Jatim)  
Sekretaris Dewan Penasihat : H. Musani (Jakarta)  
Anggota : Hb. Ahmad Ghozali Assegaf, Lc (Sulsel)  
Tgk. H. Ramli bin Cut Abati bin Buloh  
(NAD)  
KH Abdurrahman Thobari (Jateng)  
H. Mahmud Alhamid (Sulsel)
4. Ketua Dewan Pengawas : KH. Maulana Kamal Yusuf (Jakarta)  
Sekretaris Dewan Pengawas : H. Machsuni Kaloko (Bogor)  
Anggota : KH. Nurzaini Suanda (Jakarta)  
KH. Ir. M. Al- Khothkhot (Bogor)

- Hb. Abdullah (Sulsel)  
 Buya Zulva Azrie (Sumbar)
5. Ketua Dewan Kehormatan : Hb. Ali Bin Sahil (Jakarta)  
 Sekretaris Dewan Kehormatan : H. Supriyono (Jakarta)  
 Anggota : Prof. Dr. Ing. H. Nazirudin djuned, ME  
 Dr. Hasan Idrus Al- Habsyi (Sulteng)  
 Buya Yustanul (Sumbar)

## B. Program Acara ILC TV One

Program acara ILC (Indonesia Lawyers Club) adalah sebuah acara *talk show* di TV One yang dikemas secara interaktif guna memberikan pengetahuan kepada pemirsanya, dengan pembawa acara Karni Ilyas, seorang wartawan senior dan sarjana hukum yang memiliki keterampilan retorika yang baik (Wulandari, 2013: vii).

Indonesia Lawyers Club (ILC) merupakan program acara yang digemari masyarakat Indonesia, karena dalam acara tersebut terdapat debat yang membahas serta menceritakan kejadian-kejadian dari sebuah isu-isu *up to date* yang ada di dalam negeri (Zahid, 2015). Diantaranya yaitu: sosial, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain (Asti, 2013: 65). Selain itu, Program acara tersebut selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang memiliki kualitas pada bidangnya masing-masing (Zahid, 2015).

Sesungguhnya, sebelum program acara Indonesia Lawyers Club *booming*, acara tersebut hadir dengan nama Jakarta Lawyers Club. Akan tetapi, program tersebut sangat digemari oleh banyak pemirsa, sehingga mereka menginginkan agar acara tersebut bukan hanya milik pemirsa Jakarta saja, melainkan milik pemirsa di seluruh Indonesia (Anggraini, 2015: 22).

Program acara *talk show* tersebut bersifat unik dan belum ditiru oleh stasiun tv lain. Pemilihan konsep acara tersebut juga berbeda dengan acara *talk show* lainnya, sehingga hal ini dijadikan sebagai daya jual tersendiri agar pemirsa tidak menonton program acara lain (Prasetyo, 2014). Selain itu, dalam acara tersebut, sering terjadi sebuah perdebatan antara narasumber (Prasetyo, 2014). Hal inilah yang membuat pembahasan dalam acara tersebut bersifat lebih dinamis dan komprehensif (Asti, 2013:96).

### C. Deskripsi Acara ILC TV One, Episode “FPI Menyerang, Ahok Melawan”

Acara Indonesia Lawyers Club pada episode “FPI Menyerang, Ahok Melawan” tanggal 14 Oktober 2014 dilatar belakangi oleh aksi unjuk rasa para aktivis FPI pada Jum’at di Gedung DPRD Jakarta. Aksi tersebut menjadi sorotan publik karena aksi berakhir ricuh. Beberapa anggota FPI dan polisi mengalami luka-luka akibat aksi saling serang antara kedua belah pihak. Selain itu, sejumlah sarana umum serta mobil baik milik FPI ataupun kepolisian juga mengalami kerusakan.

Sesungguhnya, adanya aksi FPI tersebut didasari atas penolakan terhadap PLT Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok. Di lain sisi, Ahok yang mengetahui hal tersebut juga marah dan mendorong wacana pembubaran ormas tersebut. Oleh sebab itu, acara ILC pada episode tersebut membuat tema “FPI Menyerang, Ahok Melawan” dengan mengundang para pengurus FPI, anggota kepolisian, Kemendagri, politisi, pengamat politik, ormas-ormas di Indonesia, dan beberapa pihak yang berkaitan dengan diskusi acara tersebut.

Acara ILC episode “FPI Menyerang, Ahok Melawan” berdurasi 3 jam 14 menit 35 detik. Acara yang berlangsung live ini diawali dengan pemutaran video yang memberitakan aksi FPI pada Jum’at, 03 Oktober 2014, di Gedung DPRD Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan acara oleh Karni Ilyas yaitu moderator dalam acara tersebut. Ia menjelaskan bahwa telah terjadi konflik antara FPI dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Jhahja Purnama. Sebelum memulai diskusi, ia mempersilahkan Sujiwo Tedjo untuk menampilkan pertunjukkan wayang kulit dengan judul “Gatutkaca Kembar”, sebagai hiburan pembuka.

Karni Ilyas kembali menjelaskan bahwa adanya aksi FPI di depan gedung DPRD dilatarbelakangi atas ketidaksetujuan FPI terhadap Ahok yang *notabene* menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki hak untuk tidak setuju. Akan tetapi yang menjadi sorotan bukanlah ketidaksetujuannya terhadap Ahok, melainkan aksi FPI yang berakhir dengan kericuhan.

Karni Ilyas memulai diskusi yaitu dengan mempersilahkan Direskrimmum Polda Metro Jaya, KombesPol Heru Pranoto untuk pertama kali memberikan penjelasan terkait aksi tersebut. Kemudian penjelasan dari KombesPol Heru ditambahi oleh Kombes.Pol Rikwanto. Debat tersebut dilanjutkan dengan *feedback* dari pihak FPI yaitu Muchsin Alattas. Acara

debat yang berjumlah delapan segmen ini berlanjut dengan pendapat serta penjelasan dari beberapa pihak yang diundang oleh ILC TV One. Adapun pihak-pihak yang mengikuti acara debat tersebut adalah sebagai berikut:

- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| a. | Kombes. Pol Heru Pranoto   | : Direkrimum Polda Metro Jaya                  |
| b. | Komber.Pol Rikwanto        | : Kabid Humas Polda Metro Jaya                 |
| c. | Muchsin Alattas            | : Ketua Umum FPI                               |
| d. | KH.Ja'far Shadiq           | : Sekretaris Umum FPI                          |
| e. | KH. Syeh Mibahul Anam      | : Ketua Majelis Syura FPI                      |
| f. | Awit Masyhuri              | : Wasekum FPI                                  |
| g. | Nusran Wachid              | : Ketua GP Anshor                              |
| h. | Benny Sosetyo              | : Tokoh Lintas Agama                           |
| i. | Ratna Sarumpaet            | : Aktivis Sosial                               |
| j. | Desmon Mahesa              | : Politisi Partai Gerindra                     |
| k. | Komarudin Watubi           | : Politisi Partai PDIP                         |
| l. | Taufik Bazari              | : Politisi Partai Nasdem                       |
| m. | Ruhut Sitompul             | : Politisi Partai Demokrat                     |
| n. | Sutiyoso                   | : Mantan Gubernur DKI Jakarta                  |
| o. | Effendi Ghazali            | : Pakar Komunika Politik                       |
| p. | Natalius Pigai             | : Komnas HAM                                   |
| q. | Marsudi Syuhud             | : Sekjen PBNU                                  |
| r. | Cholil Nafis               | : Pengurus MUI Pusat                           |
| s. | Sujiwo Tedjo               | : Seniman                                      |
| t. | Irjen.Pol. Ronnie F Sompie | : Kadiv Humas Mabes Polri                      |
| u. | Abdul Malik Haramani       | : Mantan Ketua Pansus RUU Ormas DPR RI         |
| v. | Budi Prasetyo              | : Dir.Budaya Seni Kemasyarakatan<br>Kemendagri |
| w. | Dodi Priadmadji            | : Kepuspen Kemendagri                          |

Beberapa dialog FPI dalam program acara ILC TV One, Episode “FPI Menyerang, Ahok Melawan.”, adalah sebagai berikut:

Dialog 1 (Segmen 1 dan 2)

### a. Segmen 1

Heru : “.....Kemudian yang lebih parah lagi adalah anggota kita, pak. Anggota kita ini 16 orang luka, bahkan lukanya cukup ada yang cukup parah, dan kita lakukan pengobatan, perawatan di Rumah Sakit terdekat. Setelah itu, kami tentunya melakukan upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna untuk menegakkan hukum. Karena memang, hukum itu harus kita tegakkan, hukum itu betul- betul kita harus hormati, kita junjung tinggi. Dimana kita kumpulkan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, akhirnya pada saat itu kita tangkap 20 orang awalnya. 20 orang yang terdiri dari 16 orang itu dewasa dan 4 orang ini masih di bawah umur, di.. artinya dengan kriteria undang- undang, kita lakukan proses penyidikan pada hari itu. Dan paginya kurang lebih tanggal 4 nya kita tetapkan 20 orang ini adalah sebagai tersangka, yang 4 kita tidak lakukan penahanan, yang 16 kita lakukan penahanan, karena memang aturan undang- undang mengatur seperti itu....”

Heru : “Ya memang ini cukup menarik seperti yang tadi saya katakan dari awal bahwa batu ini, setelah kita melakukan pengolahan TKP tidak sebenarnya batu itu tidak kita temukan yang serupa ada disekitar TKP. Tapi kenapa batu itu ada di situ. Kemudian polisi melakukan upaya penyelidikan. Memang cukup menarik, walaupun ini tidak realis kalau kita tanyakan pada si tersangka, karena kita hanya mendapatkan keterangan dari tersangka saat ini. Ada salah satu yang cukup menarik, karena di dalam tas sendiri yang kita sita juga ada batu itu. Di dalamnya ada batu, ketika kita tanyakan, kenapa bawa batu? bahkan dari daerah Jawa Barat. Alasannya sebenarnya tidak realis, karena apa, mereka menyatakan bahwa ini, mohon maaf, ini untuk menghitung wirid. Jadi itu kan tidak benar...”

### b. Segmen 2

#### FPI

Muchsin : “Pertama kali saya ucapkan terimakasih, cuman ada sedikit evaluasi dalam tema itu adalah FPI VS Ahok, tapi ternyata Ahok itu hilang kasusnya ini, jadi sekarang kita urusan dengan hukum. Jadi apa yang terjadi pertama...”

Karni : “Kita mengundang Ahok, tapi sampai sore tadi dia tidak memberikan jawaban.”

Muchsin : “ Ya, ya, mohon sebelumnya saya menyampaikan, minta waktu yang cukup untuk memberikan jawaban.”

Karni : “Silahkan.”

Muchsin : “Pertama yang perlu kami sampaikan, bahwa tanggal 24 FPI sudah mengadakan demo damai ke DPRD, DKI, dan sudah audiensi, dan sudah menyampaikan pendapatnya. Yang pada saat itu sebetulnya intelegen FPI menengarai akan ada suatu upaya untuk pembenturan. Sehingga, pada tanggal 24 itu FPI mempersiapkan, jika terjadi memang kita sudah siap akan ada mencium aroma pembenturan. Akhirnya tidak boleh, pakai apa namanya sepeda motor, jalan kaki, dan semuanya sudah siap untuk apa

namanya pakai pasta gigi, supaya tidak terkena gas air mata. Ternyata tidak terjadi dan damai di situ. Tidak ada masalah, berjalan dengan lancar. Sehingga, demo yang selanjutnya, yang tanggal 3 Oktober tersebut kami juga tidak ada niat, karena sudah tidak mencium akan ada benturan ya kami biasa-biasa saja. Dan demo tersebut perlu diketahui, yang melaksanakan adalah DPD DKI, bukan DPP FPI tapi DPD DKI, karena menolak Ahok. Ahok adalah Wakil Gubernur DKI, maka itu adalah DPD yang melaksanakan. DPP hanya memberikan pelaporan-pelaporan saja dan mengarahkan dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian, ketika berangkat demo itu semua sudah direncanakan, sudah mengajukan pemberitahuan kepada kepolisian bahwa demo itu berada di kantor Balai Kota DKI. Dan ketika mau berangkat demo, itu semua sudah diadakan inspeksi. Tidak ada senjata tajam, tidak ada ini, tidak ada.. semuanya sudah kondusif, bahkan disaksikan oleh seorang oknum kepolisian dari Kapolsek Tanah Abang, Pak siapa? Pak..Pak Triyono, Ya Pak Triyono, Taryono, Taryono.. Sehingga ketika berjalan kami juga heran, kenapa perjalanan ini tiba-tiba diberhentikan di depan DPRD oleh foureder kepolisian. Kemudian laskar-laskar yang membawa sepeda motor semua sama kepolisian dipersilahkan untuk memarkir di sekitar situ, sehingga terjadilah orasi-orasi. Itu juga kami persalahkan, persalahkan kepada DKI, kenapa mau diberhentikan oleh polisi di situ. Kami juga..artinya tidak tahu dari mana yang mulai, tiba-tiba terjadi pelemparan, dan akhirnya terjadilah yang terjadi. Itu semuanya tidak kita perkirakan dan sangat kita sayangkan yang terjadi, dan sebetulnya yang tindak kekerasan tersebut. Ya kita juga mendapatkan tindakan kekerasan dari polisi juga. Ada anak-anak kecil yang disiksa, diinjak- injak, dipentungi sebagaimana binatang apa namanya kadal atau apa dipentung- pentung begitu. Lalu kemudian ada beberapa laskar yang ditangkap, dipukuli, kemudian dimasukkan ke dalam mobil penjara, dikunci, dikasih gas air mata. Lalu kemudian motor-motor sabara itu yang trel trel itu melindas sampai patah tulang berapa.. 8 orang, dan itu tidak ada berita sama sekali. Seakan-akan yang luka polisi, DPRD mobilnya rusak segala macam, tapi FPI sama sekali tidak ada yang dirugikan itu. Ini tidak *fair* seperti itu. Jadi kita sudah jadi korban, tapi kita dituntut untuk dibubarkan.”

Karni : “Ini jadi korban setelah polisi dilempari atau sebelum polisi dilempari?”

Muchsin : “Apanya?”

Karni : “Jadi korban ini, atau polisi pakai pentungan sebelum polisi dilempari atau sesudah dilempari?”

Muchsin : “Yaitu setelah itu namanya setelah apa namanya.. setelah terjadi..”

Karni : “Polisi dilempari..”

Muchsin : “Ya.. nggak.. nggak, itu dua belah pihak melempar, saling melempar. Jadi ini benturan, bukan satu pihak. Kami dari FPI juga siapa yang memulai kami tidak tahu. Karena itu akhirnya kita punya tim investigasi yang sekarang sudah kita bentuk sudah menemukan beberapa protap yang dilanggar oleh kepolisian. Kenapa kita diberhentikan di depan DPRD. Padahal kita di Balai Kota, mereka sudah tahu. Lalu kemudian

pintu gerbang mestinya protapnya ditutup mesti dibuka sama polisi. Lalu kemudian membagikan pentungan sama tameng, lalu memukul-mukul, kemudian terjadilah satu suasana yang panas. Lalu tiba-tiba ada lemparan, lha akhirnya terjadi lah yang terjadi seperti itu, tapi tampak di situ gambar-gambar, polisi juga melampiasikan apa kebenciannya kepada FPI, sehingga menyiksa, merusak apa mobil-mobil punya pesantren dirusak dengan sedemikian rupa. Maka sebetulnya, ini adalah merupakan benturan dan kami juga dirugikan, yang lebih rugi lagi, isu kami yang sebetulnya adalah menolak Ahok artinya hilang menjadi isu seperti ini. Ini siapa yang main di belakang ini sebetulnya.”

Karni : “Nggak, kalau masyarakat melihat yang terjadi di tv itu live semua jadi itu menit per menitnya semua orang menonton. Itu sebelum sampai dilemparpun polisi masih pasif lho, masih pakai tameng.”

Muchsin : “Itu yang di depan, yang dibelakang melempar.”

Karni : “Ya semua suasana itu tahu diambil oleh kamera.”

Muchsin : “Ini yang menjadi tanda tanya juga, pak Karni, ternyata cctv dari kantor DPRD mati, kan luar biasa. Kenapa mati?”

Karni : “Kalau cctv di kantor pemerintahan mati itu agak umum itu, pak.”

Muchsin : “Tapi kan ada semacam alibi di situ.

Karna : “ Ya tapi itu agak umum, jadi...”

Muchsin : “Ya jadi di sini banyak sekali temuan-temuan dari tim investigasi FPI yang sebentar lagi kita akan laporkan kepada Komnas anak, KOMNAS HAM, lalu kemudian Kompolnas, dan kita temuan-temuan FPI itu kita serahkan pada mereka, dan ke DPRD kita akan sampaikan mendesak untuk membikin pansus. Kalau memang terjadi kesalahan protap oleh Polda, maka bertanggung jawab dan harus dicopot dari jabatannya.”

Karni : “Ketika terjadi pelemparan- pelemparan seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Heru, bahwa itu ternyata batu-batunya nggak batu-batu yang ada di depan Gedung DPRD, tapi batu-batu yang dibawa dari jauh. Tadi bapak bilang bahwa udah diinveksi, tidak ada senjata tajam, tidak ada yang mencurigakanlah, ternyata menurut polisi ada batu-batu yang sengaja dibawa dari tempat yang lebih jauh.”

Muchsin : “Itulah.. makanya perlu diinvestigasi, perlu dibuktikan di situ. Apakah benar mereka bawa dari Petemburan, apakah mereka dari tengah jalan? Kita kan nggak bisa melihat itu. Lalu tiba-tiba ada juga samurai. Samurai itu gampang, beli di Senin, kasih apa namanya beli bendera FPI, dibikin sablon, diiket, langsung taruh situ kan bisa saja terjadi. Ini biasa kliselah terjadi seperti itu. Mulai dulu kita begitu. Coba buktikan, siapa yang membawa samurai itu sebetulnya. Apa begitu saja ada di jalan atau ada yang bawa, yang bawa siapa? Kan begitu. Jadi sekarang ini memang kita sangat sayangkan secara media, kita ini sudah dihakimi sebelum proses hukum. Ini yang jadi masalah. Sehingga sampai tuntutan pembubaran, ini segala macam. Kita juga rugi besar karena kehilangan opini yang kita ini menolak Ahok.”

Karni : “Tapi katanya ada 17 kali dalam masa 3 tahun ini, FPI melakukan demo yang pakai kekerasan begitu.”

- Muchsin : “Yang pakai kekerasan itu, itu sebetulnya investigasinya kurang lengkap di situ, kadang-kadang itu dibenturkan, kita ini. Dibenturkan, apa kadang- kadang kita ujug- ujug datang kemudian bentur orang, kan enggak. Mesti ada sesuatu terjadi akar masalah. Itu sebetulnya harus jeli di situ. Jadi akhirnya ya terjadilah, dan semuanya kasus-kasus hukum, kami sudah pertanggungjawabkan. Cuman sedikit yang kita sampaikan kepada media. terutama kepada TV One, tolong kasus-kasus yang sudah selesai itu nggak usah dicuplik lagi, diangkat lagi, untuk mendorong pembubaran. Nggak perlu. Karena pembubaran juga nggak menjadikan masalah. Proses begitu panjang, begitu dibubarkan setahun, 5 menit setelah itu kita deklarasi lagi. Apa justru jadi masalah? Gampang membubarkan FPI, nggak usah dibubarkan, FPI bubar sendiri. Tegakkan hukum, berantas korupsi, kembalikan kepada undang- undang dasar 1945, pancasila, kita akan bubar sendiri tanpa dibubarkan.”
- Karni : “Nah, Kalau di TV itu apa namanya, diambil lagi dokumentasi lama- lama, itu tidak hanya kasus FPI. Kasus korupsi juga, yang lama keluar lagi. Ada juga yang protes kenapa yang dulu dikeluarin lagi, ya memang berita harus ada...”
- Muchsin : “Karena beritanya lagi yang terjadi tanggal 3, kenapa masa lalu-masa lalu dibawa gitu, itu yang jadi masalah..”

Dialog 2 (Segmen 3)

### c. Segmen 3

- Karni : “Pemirsa, kita kembali ke diskusi kesayangan kita Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya ke Sekretaris umum pak Ja’far Shadiq. Tadi disinggung-singgung soal Ahok. Ahok itu dipilih melalui Pilkada langsung, artinya langsung rakyat Jakarta memilih Gubernur Jokowi, Ahok sebagai Wakil Gubernur. Sekarang pihak FPI tidak setuju dengan Ahok untuk menggantikan Jokowi, walaupun menurut undang- undang pilihannya tidak ada lain, wakil gubernur yang harus naik kalau gubernurnya berhalangan tetap. Sebenarnya apa keberatan dari FPI terhadap Ahok?”
- Ja’far : “Jadi begini, Pak Karni. Sebelumnya saya mohon maaf, juga kepada semuanya, ini sebetulnya adalah aspirasi daripada warga Jakarta yang disampaikan kepada DPD FPI DKI Jakarta mengenai masalah Ahok ini. Pertama-tama Ahok ini sering mengatakan menyebutkan pernyataan-pernyataan mengenai masalah pimpinannya itu sendiri. Dan keberadaan Ahok ini, bagi kami kaum muslimin adalah memang mutlak keharamannya di dalam Al- Qur’an, jadi tidak boleh seorang muslim itu dipimpin oleh seorang yang di luar Islam. Itu.. itu dalil pertamanya. Yang ke dua, Ahok pernah mengatakan masalah isu SARA. Justru dia sendiri yang mengisukan banyak isu-isu SARA yang dia kemukakan mengenai waktu dia menjabat PLT. Surat edaran ini, di sini melarang mengenai masalah qurban. Pemotongan hewan qurban di masjid, di sekolah, di mana, sementara pemotongan hewan qurban itu adalah merupakan

ibadah bagi kaum muslimin. Lalu Ahok dikeluarkan berarti bertentangan dengan Pancasila pasal 29.. UUD, UUD '45 pasal 29.”

- Karni : “Itu tidak boleh di sekolah atau di masjid?”
- Ja'far : “Di masjid juga sama, disini dijelaskan: ditempat-tempat umum, di masjid, dan sebagainya, ini semua. Lalu di ditanya lagi, dia tidak mengakui ini. Padahal ini ada aturannya, dia yang dikeluarkan yang dia tanda tangani waktu jadi pejabat menggantikan Jokowi waktu itu.”
- Karni : “Tapi nyatanya kita berkorban di masjid, lha nggak ada yang melarang.”
- Ja'far : “Lalu banyak lagi, bukan ini saja. Lalu dia mengatakan, dia berwacana kalau KTP kolom agama dalam KTP harus dihapuskan, begitu...”
- Karni : “Tapi kan belum ada...”
- Ja'far : “Lha iya...”
- Karni : “Perda, artinya...”
- Ja'far : “Artinya kan begini Pak Karni, ini suasana akan memicu konflik, gitu. Sedangkan sementara negara kita ini berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pancasila nomer satu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti negara ini berdasarkan menjunjung tinggi nilai- nilai agama, kalau wacana penghapusan kolom agama di KTP itu sangat berbahaya kalau dilontar-lontarkan begitu. Yang kedua, dia juga pernah menghapus, atau merobohkan masjid yang ada Taman Ismail Marzuki, itu fasilitas umum. Alasan renovasi sampai hari ini tidak ada lagi pembangunan itu masjid. Itu alasannya renovasi, sampai masyarakat muslim di sana tidak bisa shalat. Nah, masyarakat mengadu kepada DPD FPI, jadi menolak, itulah alasannya.”
- Karni : “Tapi jangan-jangan masyarakat yang sama ketika Pilkada justru memilih...”
- Ja'far : “Ya itu itu..”
- Karni : “Pasangan....”
- Ja'far : “Itu masalah lain masyarakat lain. Dia memilih waktu itu, satu paket mungkin dengan Pak Jokowi. Gitu kann?”
- Karni : “Atau kalau dia tidak memilih, berarti yang setuju penduduk Jakarta lebih banyak dari yang nggak setuju.”
- Ja'far : “Enggak, justru di dalam waktu pemilihan, yang golput lebih menang. Yang tidak milih.”
- Karni : “Ya yang golput....”
- Ja'far : “Yang yang tidak milih kan yang tidak menang. Berarti yang setuju itu satu paket itu, justru yang tidak milih yang menang.”
- Karni : “Ya kalau golput kita nggak tahulah.”
- Ja'far : “Ya itu dia dari konteks apa? Dari konteks apa, dari konteks hasil polling pemilu. Lalu Ahok apa lagi dosa Ahok? Banyak sekali terhadap umat Islam Jakarta. Itu, dengan dia mengadakan lelang jabatan, akhirnya di daerah mayoritas umat Islam tergantikan banyak, sampai DPRD-nya dibilang *goblok*. DPRD dibilang *goblok* sama dia. Lalu karyawan Pemda yang udah agak sepuh, agak lelet kerjanya dibilang bajingan. Kalau orang betawi dibilang itu mulut *nyablak*, mulut comberan. Nah, apakah pantas?

Apakah tidak ada peraturan bahwasannya seorang pejabat, seorang insan publik berbicara itu jadi tauladan, begitu. Itu kan mesti jadi perhatian itu. Nah, itu moralnya di mana bahasa-bahasa itu? Akhirnya, ya apa yang terjadi ya terjadi. Menolak mereka kepada kepemimpinan Ahok. Jadi kalau ada orang yang menolak kepada Ahok itu saat ini sangat realistis, bukan masalah. Dan perlu dicatatkan, di negara kita ini ada di Betawi khususnya. Hukum itu kan ada tiga sumber hukum itu. Ada hukum negara konstitusi, ada hukum agama, dan juga hukum adat. Nah, di dalam hukum konstitusi itu mungkin boleh non muslim jadi, tapi dalam hukum agama melarang. Lalu hukum adat Betawi, orang Betawi tidak boleh dipimpin oleh luar Islam, karna mayoritas orang betawi Islam. Dulu, sejarah saya belajar sama orang-orang tua, kalau ada orang kafir datang ke rumah orang betawi diterima secara baik-baik. Tetapi begitu dia pulang, pasti diseretu najis katanya. Orang betawi tuh dulu tuh begitu. Jadi 2-0 sebetulnya tentang hukum aja. Hukum adat tidak membolehkan, hukum agamapun tidak membolehkan. Di Indonesia kan tidak menafikan hukum adat, itu sumbernya. Jadi, jadi hukum konstitusi boleh kalau disebutkan hukum 2-0 hukum itu. 2-1 ya.. satu ya..”

Karni : “Ya.. taruhlah banyak yang mengeluh ke FPI. Sebagai ormas, FPI bisa salurkan ke partai-partai politik yang ada wakilnya di DPRD DKI.”

Ja'far : “Itu kan sudah.”

Karni : “Ya saya kira itu kan jalannya.”

Ja'far : “Itu kan sudah disalurkan. Yang 24 September datang baik-baik, tidak ada masalah. 24 September kan mereka datang, kita demo, demo datang menyalurkan aspirasi, diterima, kita sampaikan itu semua.”

Karni : “saya kira cukup itu kan? Tidak perlu ada kekerasannya.”

Ja'far :”Nah, kekerasan itu kan eksek saja. Di lapangan tadi diceritakan bagaimana kronologis kejadian itu. Itu kan hanya eksek saja. Kalau tidak dipancing- pancing juga tidak. Jadi yang pasti, pada saat ini kita ini,kami dari DPD hanya mendorong kepada yang ada di di di apa namanya istilahnya di Jakarta, bahwasannya ini adalah penolakan terhadap Ahok. Isu penolakan terhadap Ahok bukan hanya dilakukan oleh FPI, karena sebelum-sebelumnya FBR juga turun Forum Betawi bersama juga turun. Jadi bukan FPI saja yang menolak. Dan mungkin besok akan gelombangnya lebih besar lagi penolakan terhadap Ahok itu. Tadi siang, ulama habaib se-DKI Jakarta sudah mulai berkumpul, sudah memutuskan. memusyawarahkan.”

Karni : “Ya itu undang-undang kan menjamin boleh. Lebih besar juga boleh.”

Ja'far : “Tadi-tadi kelakuan..”

Karni : “ Yang nggak boleh kan yang..melanggar hukum..”

Ja'far : “Akhlaknya tadi kalau seorang yang Aceng Fikri saja, Aceng Fikri saja karna nikah lagi gitu kan, menceraikannya dengan itu bisa dilengserkan. Normanya kan ada norma. Ada etika pejabat. Norma dan etika pejabat itu ada aturannya. Nah, kalau semacam Ahok yang bahasanya comberan kata orang Betawi, mau diapakan? Anak buahnya sendiri dicaci-maki, anak buahnya sendiri kadang dimarahi. Malah kita dapatkan laporan

tertulis di PU itu bahwasannya di PU DKI tidak boleh ada rois, bimbingan pengajian. Ini kan Ahok semua kerjaannya, begitu.”

- Karni : “Baik, Bapak- bapak. Yang lain ada tambahan yang ada di sini?”
- Misbahul : “Tambahan untuk tadi kita evaluasi pada pihak kepolisian, introspeksi juga. Kita jangan mau diadu antara FPI dan Polisi. fokus kita kepada.....”
- Karni : “Yang mengadu ini siapa, pak?”
- Misbahul : “Media.”
- Karni : “Nggaklah....”
- Misbahul : “Sebentar..” Masalah kekerasan yang ramai, FPI dengan kekerasan minta dibubarkan itu beritanya, setiap jam setiap detik. Sementara partai-partai yang melakukan kekerasan, itu hanya sekali. TV One pernah didemo malam hari oleh satu partai. Hanya sekali kok. Semalam sudah selesai, takut...Ini dampak kekerasan. Kalau yang namanya kekerasan semua itu harus dibubarkan ini semua partai juga bakal dibubarkan. Ini kita punya, seluruh partai kita datanya punya. Jadi sekali lagi, fokus kita, bapak- bapak polisi. Persoalan ada korban di pihak kepolisian dan di pihak dari anak- anak FPI kita akui. Tapi kalau bicara kerugian banyakan di FPI. Banyak kerugian di FPI. Tapi kita bukan itu. Kenapa kita tutup itu, kita akan dorong pansus untuk melakukan tim investigasi, kita sudah menemukan data-data. Jadi siapa yang memulai kita punya rekaman. Yang dari anggota DPRD ternyata dia syuting dari atas omongan dua orang DPRD. “Lho kok polisi mulai”, lho batu itu dari dalam dulu kok, Jadi kita punya data, kita punya CD-nya. Makanya kenapa FPI akan dorong DPRD untuk bikin pansus. Karena ini kita investigasi jujur. Ketika anak kita salah, salah. Kita benar, benar. Tapi itu.. jadi sekali lagi, fokus kita kepada penolakan Ahok, sepakat? Sekali lagi tadi siang, seluruh ulama habaib, tokoh masyarakat Betawi berkumpul dan sepakat menolak Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, Insya Allah tanggal 10 November nanti, seluruh umat Islam DKI yang langsung dipimpin oleh ulama habaib, tokoh masyarakat DKI akan turun dan sedang mengumpulkan data angket untuk diserahkan kepada DPRD. Jadi ini ini kuncinya jadi mohon sekali lagi kepada dari pihak kepolisian, kita tetap taat hukum. Kesalahan silahkan proses, dan FPI selama ini sudah menebus. Yang dipenjara sudah ada, kita taat hukum, tapi sekali lagi jangan diadu dengan FPI. kita taat hukum. Tapi sekali lagi jangan diadu dengan FPI. Fokusnya adalah Ahok tidak boleh memimpin di DKI Jakarta. Jadi ini ini yang menjadi prinsip, sekali lagi, untuk sekali lagi untuk Pak Karni, ini saya mau nanya, ini anti kekerasan atau anti Islam? Kalau anti kekerasan, semua kekerasan porsinya sama dong? Kenapa kalau FPI yang melakukan kekerasan beritanya begitu gencar, kalau partai tidak gencar, kalau mahasiswa tidak gencar.”
- Karni : “Kalau partai polisinya nggak sampai 16 orang, bonyok-bonyok kayak gitu..”
- Misbahul : “Nggak bisa. Itu kebakaran banyak, 98 itu kantor DPRD, tapi tidak, Pak Karni sendiri tidak vokal terhadap partai mengalami kerusakan.” Saya nanya pada pribadi Pak Karni, anti kekerasan atau anti Islam?”

- Karni : “Begini, kalau 1998 ya, TV One belum lahir, pak. 2008 baru lahir.”
- Ja’far : “Jadi begini, Pak Karni. Mohon maaf juga, ini yang jadi masalah juga, Ahok ini meluncurkan wacana, para pegawai DKI bahwa cuti idul Fitri dihapus. Jadi banyak, Kita jumpai di sini, wacana ini sudah diwacanakan begitu. Yang jadi masalah juga, bagi kaum muslimin itu, yaitu masalah-masalah dia mendukung legalisasi pelacuran. Sampai dia katakan bahwa Muhammadiyah munafik, waktu Muhammadiyah menentang. Maka dilaporkan adik-adik Muhammadiyah itu bahwa Ahok telah mencemarkan Muhammadiyah. Wacana-wacana.. lha sekarang kejadian begitu. Jadi pada intinya, masyarakat Betawi saat ini kesel sama Ahok itu masalah. Masalah *bacotnya* itu lho. *Bacotnya* itu yang kurang ajar itu, itu *bacotnya* itu yang mesti dijaga. Kalau katakan baik buruk itu dengan lisan. Kalau lisannya begitu. Kan ada bagaimana seorang pejabat, bagaimana seorang publik figur, bagaimana seorang pemimpin. Ini mesti jelas. Jadi sebenarnya bukan masalah insidennya. Ahoknya ini yang kurang ajar *bacotnya* ini yang menghina-hina. Sampai tradisi-tradisi Betawi itu mau diganti. Dibilang ondel- ondel itu ngapain. Ondel- ondel hanya pengamen-pengamen saja. Padahal mesti dia lestarikan budaya Betawi, Gitu lhooh. Dia ragamkan budaya-budaya Betawi Dia katakan itu hanya untuk mengamen di pinggir jalan, menyesatkan orang miskin.”
- Karni : “Bapak sudah konfirmasi bahwa dia benar ngomong seperti itu? Karena kalau Idul Fitri.. tunggu dulu.. Kalau Idul Fitri dibilang nggak boleh libur, itu kalender merahnya dua hari.”
- Ja’far : “Itu kan wacana, yang mereka ini sampaikan kepada kita. Gitu lho..”
- Karni : “Beda ya?”
- Ja’far : “Banyak lagi yang dia kerjakan ini. Kegiatan yang lainnya membatasi syiar Islam, dan sebagainya. Itu yang jadi maslaah. Berarti kalau dia sudah membatasi syiar Islam berarti bertentangan dengan menjalankan syariat agamanya masing- masing”
- Karni : “Ya, Pak Misbahul.”
- Masyhuri : “Saya ingin menyampaikan hadits nabi besar Muhammad SAW. Beliau bersabda: *سَلَامَةُ الْإِنْسَانِ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ* Jadi selamatnya insan itu terdapat dari lisannya. Lha ini Ahok, begitu dahsyat penolakan yang disampaikan memang lisannya kurang bisa dijaga. Di Jakarta ini Mayoritas umat Islam. Ketika bicara masalah Kurban, ini menyedihkan di Jakarta ini anak- anak SD biasanya iuran untuk berkorban, dan ternyata dilarang saat ini untuk berkorban di sekolah- sekolah SD. Ini kalau kita mendalam di dalam syariat, berarti ini ada pembunuhan pemahaman agama dari dini. Dimana dari SD itu mereka diajarkan mengenal kurban, mengenal syariatnya kok dilarang. Ini yang mengejutkan. Sedangkan Gubernur- Gubernur yang dulu itu nggak berani begitu. Padahal muslim. Lha ini sudah non muslim dan dia berani sampai ke ranah itu. Lalu selanjutnya, dagang hewan qurban di terotoar kemarin. Ini kan syiar begitu. Banyak orang yang tadinya nggak ada niatan untuk berkorban, lalu begitu lalu lalang melihat hewan kurban, Pak Karni. Kemudian dia tertarik dengan hal itu. Nah, lalu ada lagi, ee wacana yang masih wacana Ahok. Dia

punya statemen luar biasa. Dia ingin melokalisasi pelacuran di Pulau Seribu misalkan. Ini kan sangat membahayakan juga, begitu. Dan oleh karenanya, pada prinsipnya kami FPI ini, karena mendapat dorongan, mendapat masukan dari umat Islam yang ada di Jakarta, akhirnya terjadilah kami ini melakukan aksi. Nah, adapun tadi ada disinggung dari daerah, ada yang dari Bandung, gitu kan Majalengka, dan lain sebagainya. Ini solidaritas sebetulnya. Ketika temen-temen di daerah itu mendengar bahwa di Jakarta itu akan ada aksi, mereka ikut akan melakukan aksi ini tanpa kita undang sebetulnya. Dan kenapa dari luar kota bisa ikut, karena kasus Ahok ini. Kalau ondel-ondel ini ya.. itu kasus Betawi. Lalu dia bilang orang-orang Betawi itu nggak bego'-bego' amat. Jadi nggak bego'-bego' amat berarti bego'. Nah itu Betawi, gitu kan. Nah, ketika dia masuk ranah Qurban ini ranah syariat. Sudah masuk ranah agama, berarti sudah bicara Islam. Sehingga wajar. Jangan kata Majalengka dan Bandung, kemungkinan dari Irian Jaya sampai Aceh bisa datang ke Jakarta, karena ini sudah masuk wilayah agama. Maka dari itu, saya akan terus, kami akan terus dengan ulama dan para habaib di DKI Jakarta, setiap hari Jum'at kami akan menggelar aksi damai, sampai Ahok itu betul-betul tidak dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan kami mendorong secara konstitusi kepada DPRD DKI Jakarta untuk tidak takut dan yang paling penting jangan sampai masuk angin, kira-kira begitu. Harus berani menolak Ahok menjadi Gubernur, karena mereka punya hak angket, dan sebagainya. Barangkali itu saja.”

Karni : “Baik, pemirsa. Memang kita berharap pendekatannya adalah merangkul publik, bukan mengemukakan kekuasaan. Tapi dalam hal demokrasi, memang benarlah kata Steven kata Profesor dari Harvard University, “Demokrasi adalah pengendali yang tidak sempurna, atas dua hal, yakni: kekerasan anarki dan kekerasan tirani.” Kita rehat sejenak..”

Dialog 3 (Segmen 4, 6, dan Segmen 8)

#### d. Segmen 4

Nusran : “Saya melihat ini untuk yang kesekian kalinya, menilai bahwa kekurangtepatan dalam implementasi berdakwah masyarakat Indonesia. Tadi disampaikan oleh teman-teman dari FPI mengatakan kita ini punya tiga hukum: konstitusi (hukum negara), hukum agama, dan hukum adat. Di atas hukum agama dan hukum adat itu ada konstitusi. Ketika kita ini bernegara, maka kita ini acuannya adalah konstitusi. Nah, karena itu sekali lagi acuannya adalah konstitusi.....”

#### Segmen 6

Ruhut : “Juru bicara partai Demokrat. Terimakasih, Bang. Saya banyak sekali, ratusan menerima sms dan *twitter*. Jadi saya mohon maaf kepada rekan dari FPI, yang meng-sms dan men-*twitter* saya ini 99% umat muslim. Boleh nanti lihat, dan semua marah dengan FPI. Itu fakta, pak. Ya ini sms nanti bapak bisa lihat, karena saya baca sms ini, saya pembawa damai, saya hanya bisa berdoa: “Tuhan, maafkan mereka, karena mereka tidak

tahu apa yang mereka perbuat.” Itu do’a saya, baik FPI maupun juga adik saya Ahok. Sebenarnya, Bang Karni, kalau Ahok nggak mau datang, paling tidak kalau Ahok lagi nonton, “Hok, tolong telfon ILC nanti dikasih kesempatan dengan Bang Karni”. Seorang filosof yang sisetir oleh Bang karni itu benar sekali. FPI dalam hal ini tirani. Kita mayoritas muslim, tapi sahabat-sahabat muslim lainnya faktanya mereka berkeberatan. Yang saya ingin katakan, saya ikutin saja jalan pikiran FPI dari tadi berbicara, banyak yang sms, “oh FPI punya intel?” Ini banyak yang sms, bang. Nyatanya kita hormatilah ada intelnya, tapi nyatanya intelnya juga salah. Ditanyakan di lapangan, tahunya tidak demikian. Tadi juga yang bilang bapak- bapak juga dari FPI. Setelah itu, saya seorang lawyer, saya ingat sekali kalau izin demo, tadi FPI juga yang mengatakan, apalagi mau melaporkan juga ke KOMNAS anak. Jelas di dalam izin itu kalau demo tidak boleh bawa anak. Tapi tadi diakui, banyak bawa anak- anak. Makin pening aku, tante. Itu tidak boleh, melanggar hukum, ya.”

Ja’far : “Nggak ada yang bawa anak, pak. Dalam demo tidak ada yang bawa anak. Anak- anak itu bukan, santri, gitu. Jadi anak- anak santri dateng begitu saja.”

Ruhut : “Ya..”

Ja’far : “Kita tidak membawa anak kok selama ini demo.”

Ruhut : “Ya, Pak.”

Ja’far : “Tidak membawa anak kok selama ini.”

Ruhut : “Kan saya begini, saya kaitkan dengan sahabat saya Desmon. Kalau saya lembaga tidak pernah salah, kalau oknum saya sependapat dengan Desmon. Tapi dalam peristiwa ini, saya beri seratus nilai untuk polisi. Kenapa saya katakan demikian, saya salut dengan Pak Tarman, saya salut dengan Kapolda baru Pak Dwi, karena di lapangan kadang- kadang...”

Sekjen PBNU :”.....Yang kedua tentang dakwah. Lihat ke belakang, nusantara menjadi mayoritas Islam ini, itu tidak ada netesnya darah, karena apa? para wali dakwahnya itu cultural prut, pendekatan kultur budaya. Pendekatan sesuai akal budayanya. Maka, kalau kita lihat saja, Islam corak gaya Madura, agak berbeda dengan Islam corak gaya Sumatra Barat. Islam gaya corak Sumatra Barat, akan sedikit berbeda dengan corak gaya coraknya di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, Jawa Barat, dan selanjutnya. Para Wali ini berdakwahnya mereka menggunakan cultural prut, tidak model pakai pemaksaan, tidak model pakai kekerasan. Hasilnya kita lihat ini. Nah, ketika kita memakai kekerasan, masya Allah, oh ini lho, ini lho Islam. Oh ini ya ajaran Islam, itu yang saya tidak terima.....”

#### e. Segmen 8

Misbahul : “Baik, Terimakasih. Pertama tanggapan untuk Sekjen PBNU, ini karena NU itu orang tuannya FPI. Terimakasih atas kritikan yang masuk. Tapi mohon tolong orang tua untuk cek kembali tentang medan juang nabi, medan juang Islam, itu ada tiga: Dakwah, Hisbah atau *amar ma’ruf nahi munkar*, kemudian Jihad. Masing- masing ada dalilnya, masing- masing

ada caranya. Dulu Walisongo itu pernah memancung, mematikan, membunuh Syeh Siti Jenar. Rasulullah juga dulu memimpin perang dan pernah menganjurkan untuk menghancurkan Masjid Dirar. Kemudian untuk dari pihak kepolisian terimakasih. Masukan yang lain, tentunya ya satu, tentang siapa yang salah, siapa yang anarkis, kita tunggu nanti pansus DPR..DP.. DPRD DKI Jakarta. Kemudian mohon kiranya dari pihak Polda Metro Jaya untuk mengizinkan Heru Maulana yang ditahan oleh Polda Metro Jaya patah tulang pundak kirinya, minta untuk diizinkan dan diperiksa, diobati oleh dokter autopedi FPI, yaitu dr. Yose. Ada untuk Nusran Wahid dari ketua GP Anshor, FPI tetap menjunjung tinggi hukum Allah, di atas hukum manapun. Adapun beliau mengatakan hukum konstitusional lebih tinggi dari hukum agama, hukum Allah atau Al-Qur'an. Jadi saya beritahukan kepada seluruh anggota GP Anshor di seluruh Indonesia, mulai besok lebih baik baca ayat-ayat konstitusional daripada baca ayat suci Al- Qur'an. Kalau ada yang meninggal, nggak usah dibacain Yassin, tapi bacakan ayat konstitusional. Itu keputusan dari ketua GP Anshor. Kemudian untuk Pak Ruhut, saya setuju kita negara Indonesia, bukan negara Islam. Tapi ingat, Indonesia juga bukan negara setan. Tapi Indonesia negara yang berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai- nilai tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau beliau tadi mengatakan banyak ratusan dari *twitter* yang masuk tentang tidak setuju dengan FPI. FPI punya *twitter* dan *facebook*, sudah ribuan bahkan puluhan ribu yang mendukung gerakan FPI. Yang terakhir ee.. sangat, sangat menyayangkan dari FPI, Ahok tidak hadir, padahal tadi Pak Karni mengatakan sudah diundang dan saya sampaikan bahwa FPI DKI Jakarta, sudah berkali-kali meminta audiensi kepada Ahok, tapi sampai hari kemarin, sekalipun tidak pernah permintaan itu dikabulkan. Jadi FPI DKI sudah cukup untuk meminta, tapi tidak pernah diberikan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, mudah- mudahan jawaban- jawaban yang sudah diberikan oleh kawan- kawan, FPI tetap selalu introspeksi, dan makna- makna kekerasan sekali lagi , kekerasan yang disampaikan, tidak semua kekerasan adalah sebuah kejahatan. Kalau ada maling yang mau masuk rumah kita, maling itu mau merampok, mau memperkosa anak kita, membunuh anak kita, kita lawan dengan kekerasan, maling itu kita bunuh. Yakin undang- undang mengatakan kekerasan yang saya lakukan tidak disalahkan. Tidak semua kesalah.. ee kekerasan bisa diartikan dengan kejahatan. Terimakasih.”